



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran  
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>  
 Volume 7 Nomor 3, 2024  
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/07/2024  
 Reviewed : 03/08/2024  
 Accepted : 05/08/2024  
 Published : 22/08/2024

Mukhamat Rif'an  
 Makruf<sup>1</sup>  
 Muhammad Taufiq  
 Hidayat<sup>2</sup>

## DETERMINAN KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR PERIODE TAHUN 2017-2021

### Abstrak

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi APBD yang mencakup seluruh 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Akan tetapi, karena jumlah data yang dibutuhkan sedikit, maka hanya 32 kabupaten dan kota yang diikutsertakan dalam penelitian. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah (Y) Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2017–2021 yang merupakan indikasi variabel. Tiga variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah (X1) Ukuran Pemerintah, (X2) Dana Perimbangan, dan (X3) Pertumbuhan Aset. Variabel-variabel tersebut dihitung dengan menggunakan rasio. Kota-kota di Jawa Timur tahun 2017 hingga 2021 menunjukkan bahwa ukuran pemerintah memiliki dampak yang menguntungkan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten. Kinerja keuangan kabupaten di Jawa Timur dipengaruhi secara positif oleh Dana Perimbangan, sebagaimana dibuktikan oleh nilai probabilitas signifikansi uji t sebesar 0,00. Pengaruh tersebut berlangsung dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Nilai probabilitas uji t sebesar 0,00 menunjukkan bahwa pertumbuhan aset berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah. Ukuran pemerintah, dana perimbangan, dan pertumbuhan aset berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2017–2021, terlihat dari nilai probabilitas signifikansi sebesar  $0,87 > 0,05$  yang menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan aset tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai signifikansi uji f sebesar 0,000b yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, yang berarti model regresi linier yang diestimasi layak atau memiliki pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersamaan. Penelitian ini juga memiliki kekurangan yaitu menggunakan data 32 kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2017-2021 dan bukan data riil 38 kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2017-2021.

**Kata Kunci:** Determinan, Kinerja Keuangan, Ukuran Pemerintah, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Aset.

### Abstract

This kind of research is descriptive quantitative in the environment. The data used in the study came from secondary data that came from the APBD Realization Report, which included all 38 East Java districts and cities; however, because of the small amount of data needed, only 32 districts and cities were included in the research. The dependent variable in this study is (Y) Regional Financial Performance from 2017–2021, an indication of the variable. Three independent variables are employed in this research: (X1) Government Size, (X2) Balancing Funds, and (X3) Asset Growth. These variables are calculated using ratios. Cities in East Java from 2017 to 2021 show that government size has a beneficial impact on district government financial performance. East Java districts' financial performance is positively impacted by the Balancing Fund, as evidenced by the significant probability value of 0.00 t test. This effect lasts from 2017 to 2021. The substantial probability value of the 0.00 t test indicates that asset growth has a detrimental impact on the financial performance of the government. Government size, balancing funds, and asset growth have a positive impact on the financial performance of the district government/Cities in East Java 2017–2021, as can be seen from the significant probability value of  $0.87 > 0.05$ , which indicates that the asset growth variable has no effect on the financial performance of the regional government of the district government. This is

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
 email: rifanm0z4r@gmail.com, putrataufiq69@gmail.com

demonstrated by the significant value of 0.000b for the f test, which is less than the significance level of 0.05, implying that the estimated linear regression model is feasible or has a significant influence of the independent variable on the dependent variable at the same time. This study also has drawbacks, such as utilizing data from 32 East Java districts/cities from 2017 to 2021 rather than the real 38 East Java districts/cities from 2017 to 2021.

**Keywords:** Determinants, Financial Performance, Government Size, Balancing Funds, Asset Growth.

## PENDAHULUAN

Untuk meningkatkan pelayanan publik, suatu pemerintahan daerah tentu mempunyai otonomi daerah. Hak, yurisdiksi, dan tanggung jawab suatu daerah ditentukan oleh otonomi daerah, yaitu kapasitas, wewenang, dan tugas yang diberikan kepada suatu daerah untuk mengawasi dan mengurus urusan dalam negeri dan kepentingan umum daerah setempat dalam NKRI. Pemberian wewenang atau desentralisasi otonomi tersebut diberikan kepada Daerah melalui APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat.

Dalam sebuah pemerintahan daerah pemerintah harus mengupayakan bagaimana pemda mempertanggungjawabkan untuk melaksanakan otonomi daerah dengan adanya APBD daerah, hal tersebut dapat dilihat dari Kinerja Keuangan pada pemda yang meliputi ukuran pemerintah dalam bidang ekonomi, dana perimbangan dan pertumbuhan aset dalam APBD yang sah. Ukuran pemerintah ialah skala yg dipakai buat pengukuran nilai suatu objek dilakukan untuk menentukan secara langsung seberapa besar atau kecilnya objek dengan kapasitas eksklusif, salah satunya pengukuran pada bidang ekonomi, hal ini akan menyampaikan tekanan yang lebih tinggi pada pemda bila mempunyai asset yang tinggi. Pemda yang mempunyai ukuran lebih tinggi akan mendapat tekanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemda yg mempunyai ukuran lebih rendah. Dana Perimbangan ialah dana yang dialokasikan dari APBN kepada wilayah untuk membiayai kebutuhan mereka dalam konteks pelaksanaan desentralisasi, hal ini diatur dalam UU No 20 Tahun 2019 ayat 14. Pertumbuhan aset dapat memberikan informasi mengenai adanya peningkatan sarana dan prasarana fisik maupun nonfisik pada pemda.

**Tabel 1.1**  
Rincian PAD, Anggaran/Pagu dan Presentase Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021

TAHUN	Pendapatan Asli Daerah(PAD)	Anggaran/Pagu	Persentase %
2017	Rp 30.137,30	Rp 37.263,12	123.64
2018	Rp 37.086,32	Rp 32.815,36	113.02
2019	Rp 39.344,67	Rp 35.465,94	110.94
2020	Rp 37.042,89	Rp 39.782,73	93.11
2021	Rp 40.942,41	Rp 37.044,34	110.52

Source : [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

**Gambar 1.1**  
Diagram PAD dan Anggaran/Pagu Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021



Source : [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

Data dari diagram dan tabel tersebut didapat dari website resmi dari [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id), PAD menjadi sumber pendapatan utama bagi suatu wilayah untuk mengembangkan dan mempebaikinya. Tingginya PAD memberi keleluasaan dan kemandirian bagi daerah dalam menggunakan pendapatan tersebut untuk mendukung pelayanan kepada Masyarakat. Dengan PAD yang tinggi, daerah memiliki kapabilitas besar dalam mendanai Sebagian besar APBDnya. Hal ini mengurangi ketergantungan pad bantuan dari pemerintah

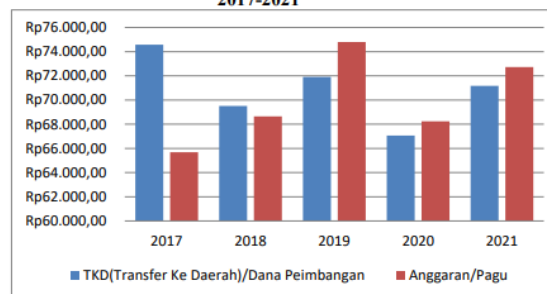
pusah, jadi semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD maka semakin kecil ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat yang mencerminkan peningkatan kinerja keuangan daerah.

**Tabel 1.2**  
Rincian TKD, Anggaran/Pagu dan Persentase Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021

TAHUN	TKD(Transfer Ke Daerah)/Dana Peimbangan	Anggaran/Pagu	Persentase %
2017	Rp 74.568,03	Rp 65.677,80	88.08
2018	Rp 69.501,88	Rp 68.653,41	101.24
2019	Rp 71.908,43	Rp 74.799,65	96.13
2020	Rp 67.063,61	Rp 68.233,94	98.28
2021	Rp 71.179,36	Rp 72.725,70	97.87

Source : [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

**Gambar 1.2**  
Diagram Tranfer Ke Daerah (Dana Peimbangan) Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021



Source : [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

Dalam gambar 1.2 dan tabel 1.2 menampilkan TKD Provinsi Jawa Timur dari tahun 2017 hingga 2021. Pada tahun 2017 persentase 88,08%. Namun, pada tahun berikutnya yakni 2018 terjadi penurunan yang mencapai 101,24%. Pada tahun-tahun berikutnya, persentase TKD mencapai 95,13% di tahun 2019, 98,28% pada tahun 2020, dan 97,87% pada tahun 2021. TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan kepada Daerah, dana ini dikelola oleh Daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dan bagian dari TKD meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil. dijelaskan pada PMK No.18/PMK.07/2023 yang sebelumnya telah mengalami perubahan pada PMK No. 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan dalam Rangka Otonomi Khusus.

Oleh karena itu hasil penelitian tersebut mendorong dilakukannya penelitian lebih lanjut pada pemerintah daerah, untuk menguji bagaimana Kinerja Keuangan pada di Jawa Timur dari Tahun 2017-2021 melalui Ukuran Pemerintah, Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Aset yang berjudul “Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Timur Tahun 2017-2021”. Hal ini karena ditemukan bahwa semakin besar Ukuran Pemerintah daerah semakin besar maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah cenderung kurang baik.

## Dasar Teori

### Akuntansi Sektor Publik

Biduri (2018;2) akuntansi sektor public terlibat dalam menyediakan layanan keuangan yang terkait dengan pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan serta hak Masyarakat melalui layanan public yang diurus oleh lembaga pemerintah. Menurut Mardiasmo (2018;15) akuntansi sektor publik berperan sebagai alat untuk menyediakan informasi yang mendukung akuntabilitas dan pengelolaan manajemen bagi pemerintah dan publik.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Sektor Publik ialah mekanisme yang menyediakan informasi dengan keuangan melalui proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam organisasi sektor publik yang ditujukan bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

### Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Mardiasmo (2018;89) Laporan arus kas, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, dan laporan keuangan neraca semuanya menunjukkan kinerja keuangan. Untuk dapat menunjukkan kinerja keuangan, laporan keuangan tersebut harus diperiksa dengan menganalisis datanya. Keputusan mengenai perekonomian, masyarakat, atau politik sering kali dibuat

terutama berdasarkan kinerja keuangan. Kinerja Keuangan pemda juga menjadi salah satu petunjuk utama dalam merancang kebijakan untuk mengelola keuangan serta mengevaluasi apakah pengelolaan keuangan pemda telah optimal dan memberikan dampak yang baik bagi kesejahteraan masyarakat (Hamid, 2018). Terdapat beberapa cara dalam mengukur kinerja keuangan yaitu rasio Kinerja Keuangan. (Putra, 2018;61).

### Ukuran Pemerintah

Menurut Tatas (2018) Ukuran pemda mencerminkan seberapa besar atau sekecil organisasi pemerintah tersebut. Menurut Mega (2019) Ukuran pemerintah yang besar bisa menyediakan lebih banyak sumber daya untuk memfasilitasi kegiatan operasional, yang dapat mempermudah penyediaan layanan kepada Masyarakat.

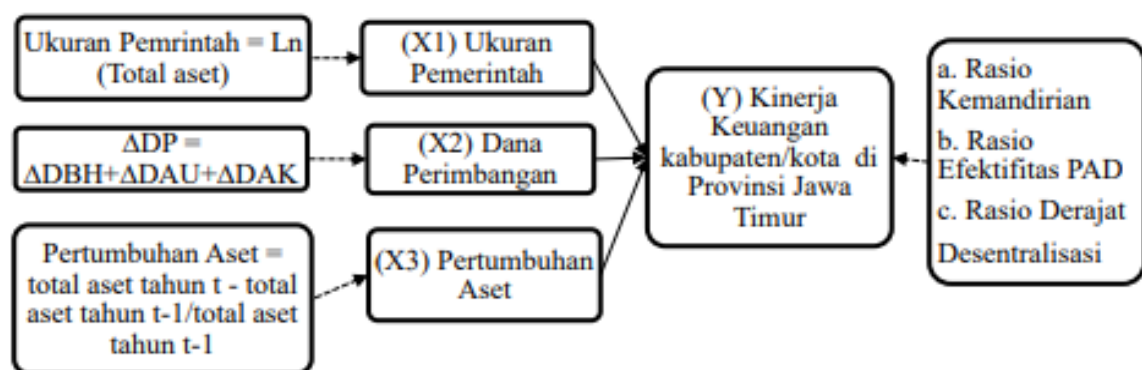
### Dana Perimbangan

Pratiwi (2018) Dana Perimbangan berasal dari APBN serta digunakan untuk mendukung desentralisasi dengan mengimbangi kebutuhan anggaran antara berbagai pemda yang berbeda. Menurut Andaresta dkk (2021) pemda yang memberikan bagi Masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan disebut dana perimbangan. Sumber dana berasal dari pemerintah pusat.

### Pertumbuhan Aset

Tujuan dari analisis aset adalah untuk memahami sumber daya keuangan dan prospek masa depan pemda sehingga masyarakat umum dapat menentukan apakah daerah tersebut merupakan tempat yang diinginkan untuk berinvestasi. Menurut (Rahman dkk 2020) Pertumbuhan Aset seringkali dikaitkan dengan pertumbuhan nilai aset perusahaan karena nilai total aset dalam neraca sering menjadi indikator utama dalam menilai kekayaan perusahaan. Menurut (Putri 2019) Pertumbuhan aset mengacu pada perubahan total aset yang terjadi dalam sebuah perusahaan setiap tahunnya, ini mencerminkan bagaimana kondisi aset perusahaan berubah sejalan dengan kegiatan operasionalnya untuk memperoleh laba atau keuntungan.

### Kerangka Berpikir



Hipotesis penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban sementara terhadap kinerja keuangan yang menjadi objek penelitian. Berdasarkan permasalahan yang diajukan serta tujuan dari penelitian ini adalah:

H0 : Ukuran Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2017-2021

H1 : Dana Perimbangan berpengaruh Negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2017-2021

H2 : Pertumbuhan Aset berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2017-2021

H3 : Ukuran Pemerintah, Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Aset berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2017-2021.

### METODE

Penelitian ini mengkaji kinerja keuangan pemerintah kab/kota di Jawa Timur pada tahun 2017 hingga 2021. Hal ini dilakukan dengan menilai pengaruh pertumbuhan aset, perimbangan keuangan, dan ukuran pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan datanya bersifat sekunder dari Laporan Realisasi APBD dan Laporan Keuangan yang diperoleh dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, sampel dipilih berdasarkan kriteria yang ditentukan. Analisis yang

dilakukan mencakup analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan pengujian hipotesis menggunakan program IBM SPSS.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### HASIL

#### 1. UJI F

Pada pengujian ini memiliki tujuan untuk mencari apakah pada variabel independent (bebas) memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependent (terikat).

**Uji -F**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1,800	3	,600	65,454	,000 <sup>b</sup>
Residual	1,430	156	,009		
Total	3,231	159			

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan  
b. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Aset, Ukuran Pemerintah, Dana Perimbangan

Source : Data diolah oleh penulis dengan SPSS 22 (2023)

Pada tabel tersebut dapat dilihat nilai dari F signifikan hitung memiliki nilai 0,000b lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, bisa disimpulkan bahwa model regresi linier menunjukkan signifikansi.

#### 2. UJI T

Pada pengujian ini memiliki tujuan untuk mencari apakah pada variabel independent (bebas) memiliki pengaruh secara individual terhadap variabel dependent (terikat).

**Uji -T**  
**Coefficients**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-,365	,545		-,671	,503
Ukuran Pemerintah	,194	,014	,925	13,891	,00
Dana Perimbangan	-,170	,024	-,483	-7,197	,00
Pertumbuhan Aset	-,011	,064	-,009	-,166	,87

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Source : Data diolah oleh penulis dengan SPSS 22 (2023)

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa angka signifikansi untuk hipotesis yang ditolak lebih dari 0,05 dan hipotesis yang diterima memiliki tingkat signifikansi kurang dari 0,05.

#### 3. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda ini dalam penelitian ini adalah analisis yang digunakan untuk menguji atau mengetahui pengaruh dari variabel independent dari Ukuran Pemerintah, Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Aset terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2017-2021.

### Regresi Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	Standartd Error	T Statistik	Sign
Kinerja Keuangan Daerah (KKD)	-,365	,545	-,671	,503
Ukuran Pemerintah Daerah (UPD)	,194	,014	13,891	,00
Dana Perimbangan (DP)	-,170	,024	-7,197	,00
Pertumbuhan Aset (PA)	-,011	,064	-,166	,87
$R^2 = 0,557$				
F Statistik = 65,453				
N =160				

Source : Data diolah oleh penulis dengan SPSS 22 (2023)

Secara sistematis hasil regresi linear berganda dengan rumus  $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$  maka dapat ditulis :

$$Y = -0,365 + 0,194 \text{ UPD (X1)} - 0,170 \text{ DP (X2)} - 0,011 \text{ PA (X3)} + e$$

Nilai koefisien X1 Ukuran Pemerintah koefisien adalah 0,194 yang berarti Ukuran Pemerintah (X1) meningkat 1 satuan maka Kinerja Keuangan Pemda (Y) akan terjadi perubahan sebesar 0,194 dengan asumsi nilai X2, dan X3 tetap. Nilai koefisien X2 Dana Perimbangan sebesar -0,170 meningkat 1 satuan maka Kinerja Keuangan Pemda (Y) akan terjadi perubahan sebesar -0,170 dengan asumsi nilai X1, dan X3 tetap. Sedangkan Nilai koefisien X3 Dana Perimbangan sebesar -0,011 meningkat 1 satuan maka Kinerja Keuangan Pemda (Y) akan terjadi perubahan sebesar -0,011 dengan asumsi nilai X2, dan X3 tetap. Untuk H3 yaitu pengujian dari seluruh variabel X dari X1 (Ukuran Pemerintahan), X2 Dana Perimbangan, X3 (Pertumbuhan Aset) terhadap Y (Kinerja Keuangan Daerah) dalam pengujian ini dapat dilihat dari Tabel 4.13 yang mempunyai F hitung 65,454 dengan nilai signifikan 0,00 yang lebih kecil dari pada nilai probabilitas yang ditentukan yaitu 0,05 ( $0,00 < 0,05$ ) maka dari nilai tersebut dapat disimpulkan variabel Ukuran Pemerintah, Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Aset secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemda Kab. dan Kota Jawa Timur Tahun Anggaran 2017-2021.

### Pembahasan

#### 1. Pengaruh ukuran pemerintah terhadap kinerja keuangan

Dari olah data dengan SPSS 22 dalam tabel diatas Uji T menunjukan nilai sig.  $0,00 < 0,05$ , maka dapat diartikan Ukuran Pemerintah memiliki pengaruh positif antara Ukuran Pemerintah dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2017-2021. Jadi pada variabel hipotesis H0 Ukuran Pemerintah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah memiliki pengaruh positif antara variabel Ukuran Pemerintah (X1) dengan Kinerja Keuangan Pemda (Y).

Hasil penelitian didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Irna T. L dkk (2022) yang berjudul "Determinants of Financial Performance In Local governments in District/City In Indonesia", pada penelitian tersebut menyatakan bahwa pada variabel ukuran pemerintah menunjukkan ukuran pemerintah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Kab. dan Kota yang ada di Indonesia. Karena dalam Ukuran Pemerintah adalah ukuran atau skala dari entitas pemda itu sendiri, yang dapat tercermin dari besarnya total aset yang dimiliki oleh pemda (Noviyanti dkk, 2018).

#### 2. Pengaruh Dana Pertimbangan Terhadap Kinerja Keuangan

Bedasarkan hasil dari olah data dengan SPSS 22 dalam tabel menunjukan nilai sig.  $0,00 < 0,05$ , maka dapat diartikan Dana Perimbangan memiliki pengaruh positif antara Dana Perimbangan dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2017-2021 karena nilai sign uji T lebih kecil dari pada Level of Significant 0,05. Maka dalam variabel ini disimpulkan bahwa Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemda memiliki pengaruh positif antara variabel Dana Perimbangan (X2) dengan Kinerja Keuangan Pemda (Y) Pemda Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2017-2021. Akan tetapi hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang berjudul "Determinants of Local Government Financial Performance" yang diteliti oleh Maya dan Arum (2022) karena Dana Perimbangan sendiri memiliki tujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal yang terjadi baik di pusat maupun di daerah

#### 3. Pengaruh Pertumbuhan Aset Terhadap Kinerja Keuangan

Bedasarkan hasil dari olah data dengan SPSS 22 dalam tabel menunjukan nilai sig.  $0,87 > 0,05$ , maka dapat disimpulkan variabel Pertumbuhan Aset terhadap Kinerja Keuangan memiliki pengaruh Negatif antara variabel Pertumbuhan Aset terhadap Kinerja Keuangan Pemda (Y) Pemda Kab./Kota di Jawa Timur Tahun 2017-2021.

Hasil dari temuan ini dapat menunjukan bahwa pertumbuhan aset yang besar tidak selalu bisa meningkatkan kinerja keuangan pemda jika aset pemerintahn tersebut tidak dikelola dengan baik

#### 4. Pengaruh Ukuran Pemerintahan, Dana Perimbangan, dan Pertumbuhan Aset terhadap Kinerja Keuangan

Dalam pengujian tersebut dapat dilihat dari tabel yang mempunyai F hitung 65,454 dengan nilai signifikan  $0,00 < 0,05$  dapat diketahui nilai dari Adjusted R Square memiliki nilai



sebesar 0,549 yang artinya 55% memiliki hubungan. Maka variabel independent (bebas) yaitu Ukuran Pemerintahan, Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Aset maka dari nilai tersebut dapat disimpulkan variabel Ukuran Pemerintah, Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Aset secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

### SIMPULAN

Bedasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dari penelitian ini yang berjudul “Determinan Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kab/Kota Di Jawa Timur Periode Tahun 2017-2021” dengan menggunakan variabel Ukuran Pemerintah, Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Aset terhadap Kinerja Keuangan bisa disimpulkan, sebagai berikut:

1. Pada hipotesis 0 ( $H_0$ ) yaitu Ukuran Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2017-2021. Hal ini dapat dilihat dari tabel Uji t dengan nilai probabilitas signifikan 0,00 maka dapat dikatakan nilai  $0,00 < 0,05$  diterima dan dapat disimpulkan bahwa variabel Ukuran Pemerintah memiliki berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemda Pemerintah Kab/Kota Di Jawa Timur Periode 2017-2021.
2. Pada hipotesis 1 ( $H_1$ ) yaitu Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2017-2021. Kesimpulan tersebut dilihat berdasarkan tabel uji t yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas signifikan 0,00 maka dapat disimpulkan bahwa  $0,00 < 0,05$  dapat dikatakan variabel Dana Perimbangan memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemda Pemerintah Kab/Kota Di Jawa Timur Periode 2017-2021.
3. Pada hipotesis 2 ( $H_2$ ) yaitu Pertumbuhan Aset berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2017-2021. Kesimpulan tersebut dilihat berdasarkan tabel uji t yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas signifikan  $0,87 > 0,05$ , dari nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pertumbuhan Aset tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemda Pemerintah Kab/Kota Di Jawa Timur Periode 2017-2021.
4. Ukuran Pemerintah, Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Aset berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2017-2021. Hal ini dilihat berdasarkan tabel yang menunjukkan nilai signifikan 0,000b lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi linier yang diestimasi layak atau dapat dikatakan memiliki pengaruh signifikan variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen.

### SIMPULAN

Pada Penelitian ini memiliki yang memungkinkan dapat dijadikan acuan perbaikan dalam penelitian selanjutnya yang diantaranya adalah:

1. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu sampel Kab/Kota yang ada di Jawa Timur Tahun Anggaran 2017-2021 berjumlah 32 Kab/Kota yang seharusnya berjumlah 38 Kab/Kota pada keseluruhannya, beberapa sampel yang terdapat pengecualian diantaranya yaitu : LHP LKPD Kab. Trenggalek 2017, Kota Pasuruan 2017, Kab. Tulungagung 2018 Kab. Blitar 2018, Kota Malang 2018 dan Kab. Jember 2020, oleh karena itu pengujian dari penelitian ini menggunakan LHP LKPD sebanyak 32 Kab. dan Kota dengan menggunakan 160 data sampel tahun anggaran 2017-2021 dan pada LHP LKPD Tahun Anggaran 2022 belum dapat terpenuhi dikarenakan masih dalam proses pengerjaan pada tahun anggaran tersebut.
2. Penelitian ini mengkaji kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur pada tahun 2017 hingga 2021. Hal ini dilakukan dengan menilai pengaruh pertumbuhan aset, perimbangan keuangan, dan ukuran pemerintahan. Sedangkan masih banyak faktor lainnya yang dimungkinkan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemda.

### SARAN

Penelitian ini menyarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan sampel yang lebih komprehensif pada provinsi yang jumlah kabupaten/kotanya lebih banyak dan menggunakan data laporan keuangan pemda dengan jangka waktu yang lebih panjang agar

perubahan kinerja keuangan pemda lebih terlihat berdasarkan outcome dari pembahasan dan kesimpulannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adinata, Patricia Meidy, And Efendi David. (2022). Pengaruh Leverage, Ukuran Pemerintahan Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)* 11.2
- Deswira Anike. 2022. Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kab. Tanah. *Akuntansi Dan Manajemen* Vol. 17, No. 1, 2022, Hal. 72-88.
- Ardelia, Novita Ika, Et Al. 2022. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Kab. dan Kota Se-Eks Karesidenan Pekalongan Periode 2016-2020." *Jurnal Aplikasi Akuntansi* 7.1 (2022): 60-80.
- Aristy, Tika, And Fatchan Achyani. 2019. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kab. /Kota Di Jawa Tengah). *Seminar Nasional Dan The 6th Call For Syariah Paper (Sancall) 2019*.
- Aulia, Ferizal, And Ikhbar Samsul. 2020. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional Dan Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Pertanahan Kab. Aceh Besar. *Serambi Konstruktivis* 4.2 (2022): 64-73
- Biduri, Sarwenda. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Umsida Press 1-197.
- Fitra, H., & ilmi Efendi, Z. 2020. Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kab. Solok Selatan. *Menara Ilmu*, 14(1).
- Handayani, H. P. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Kantor Dispenda Kab. Jenepono (Doctoral Dissertation, Universitas Bosowa).
- Hanun, Nur Ravita, Et Al. 2020. "Determinasi Dan Respon Stakeholders Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah." *Aksar: Jurnal Akuntansi Syariah* 3.2 (2020): 213-24.
- Indonesia. Permendagri No 77 Tahun 2020. *Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Lembaran Ri Tahun 2020. Jakarta.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. *tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Lembaran Negara Ri Tahun 2019. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014. *Tentang Undang-Undang (UU) Tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2014. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Mardiasmo, 2018. *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Terbaru)*, Andi: Yogyakarta.
- Putra Windhu. (2018). *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Depok. Pt RajaGrafindo Persada.
- Putri, Akhitah, And Asyik Fadjrih Nur. 2022. Pengaruh Struktur Aset, Pertumbuhan Aset, Dan Risiko Bisnis Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Struktur Modal Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)* 8.3 (2019).
- Rahman, Arya Muhammad. 2022. Pengaruh Struktur Modal Dan Pertumbuhan Aset Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Yang Terdaftar Dalam Jakarta Islamic Index (Jii). *Akurasi: Journal Of Accounting And Finance Studies* 3.1 (2020): 55- 68.